

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah diberlakukannya Undang Undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan munculnya UU No. 32 tahun 2004, pemekaran daerah menjadi kecenderungan baru dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia. Istilah pemekaran daerah sebenarnya dipakai sebagai upaya memperhalus bahasa (eufemisme) yang menyatakan proses “perpisahan” atau “pemecahan” satuwilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru. Dilihat dari kacamata filosofi harmoni, istilah perpisahan atau perpecahan memiliki makna yang negatif sehingga istilah pemekaran daerah dirasa lebih cocok digunakan untuk menggambarkan proses terjadinya daerah-daerah otonom baru pasca reformasi di Indonesia.¹

Pemekaran wilayah (propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan wilayah administratif yang cukup luas. Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan.² Berdasarkan

¹ Makagansa, H.R. *Tantangan Pemekaran Daerah*. (Yogyakarta : FusPad, 2008), hal. 17.

² Fitra Mailendra, “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia Di Propinsi Jawa Barat” (Analisis Panel Data: Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 2002-2006)”, *Skripsi*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009), hal. 2.

ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah.

Pemekaran Kabupaten Konawe Kepulauan, yang dialami melalui tulisan ini, pada mulanya merupakan bagian dari Kabupaten Konawe. Kabupaten Konawe terbentuk secara de jure berdasarkan UU. No. 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara. Saat itu nama Kabupaten Konawe adalah Kabupaten Daerah Tk. II Kendari. Kepala pemerintahannya yang pertama adalah Drs. H. Abdullah Silondae sebagai Bupati Kepala Daerah Tk II Kendari yang dilantik pada tanggal 3 Maret 1960.³

Kabupaten Kendari (Konawe) terdiri dari 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Kendari, Sampara, Wawotobi, Lambuya, Ranomeeto, Moramo, Unaaha, Asera, Lainea, Wawonii, Lasolo dan Tinanggea. Kendari menjadi ibukota Kabupaten Kendari berlangsung sampai dengan tahun 1982. Pada masa pemerintahan H. Andri Jufri, SH sebagai Bupati Kabupaten Daerah Tk. II Kendari yang keempat, ibukota Kabupaten Daerah Tk. II Kendari dipindahkan dari Kota Kendari ke Unaaha, karena Kendari menjadi Kota madya. pada tanggal 29 september 1982. Pemindahan ini dilakukan karena Kecamatan Unaaha yang berada di wilayah Kabupaten Tingkat II Kendari dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi Ibukota Kabupaten Daerah tingkat II Kendari.⁴

³ <https://konawekab.go.id/halaman/detail/sejarah-singkat>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 10.25 wib.

⁴ *Ibid*

Pada tahun 2003 Kabupaten Daerah Tk. II Kendari memekarkan wilayahnya berdasarkan UU. No. 4 Tahun 2003 tanggal 23 Februari 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan. Wilayah Kabupaten Daerah Tk. II Kendari berubah nama menjadi Kabupten Konawe dengan ibukota Unaaha pada tanggal 28 September 2004 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama dari Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe.⁵

Pada tahun 2007 Kabupaten Konawe dimekarkan sebagian wilayahnya, dimekarkan berdasarkan UU. No. 13 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara. Pada Tahun 2013 Kabupaten Konawe memekarkan wilayahnya lagi yaitu kepulauan Wawonii berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2013 Tanggal 12 April 2013 menjadi Kabupaten Konawe Kepulauan. Kabupaten Konawe Kepulauan dengan demikian menjadi salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara.⁶

Cikal bakal pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu berasal dari sebuah wilayah bekas Kerajaan Tangkombuno/Wawonii (sejak abad ke-13 hingga 1906), dilanjutkan wilayah kekuasaan distrik Wawonii di Onder-afdeeling Kendari, yaitu Distrik Wawonii (1906-1962) kemudian menjadi kecamatan yakni Kecamatan Wawonii (1963-2013) dan Waworete (1986) yang berkedudukan di Langara pada saat itu. Kecamatan ini dibentuk pada tahun 1964 bersamaan

⁵<https://konawekab.go.id/halaman/detail/sejarah-singkat>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 10.27 wib.

⁶*Ibid*

dengan dibentuknya wilayah pada tingkat kecamatan di Kabupaten Kendari (1964-2004), dan Kabupaten Konawe (2004-2013)⁷

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) pemekaran dari Kabupaten Konawe, maka Kabupaten Konawe Kepulauan mulai berbenah diri, kabupaten itu berada dalam gugusan pulau-pulau di bagian Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di sebelah Pulau Buton dan Kota Kendari. Wilayahnya sangat strategis karena perairan lautnya dilalui oleh jalur pelayaran kawasan timur dan barat Indonesia, berada pada kawasan yang sangat potensial yakni diapit oleh Laut Banda dan Selat Buton yang memiliki potensi sumberdaya keragaman hayati kelautan dan perikanan cukup besar.⁸ Ibukota Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Langara yang terletak 53 km dari Kota Kendari. Secara geografis terletak di bagian selatan khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 03°68' dan 04°16' Lintang Selatan, membujur dari Barat ke Timur antara 122°56' dan 123°16' Bujur Timur.⁹

Kabupaten Konawe Kepulauan dibentuk dengan berbagai macam alasan yang mendasari pemekaran sehingga ingin menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Setelah pemekaran terdapat perkembangan baik dari segi ekonomi maupun pembangunan yang dialami Kabupaten Konawe Kepulauan. Melihat belum banyak yang meneliti dan menulis tentang proses terbentuknya Kabupaten Konawe Kepulauan dan perkembangan Kabupaten Konawe Kepulauan sejak pemekaran, maka dari itu penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan. Dalam

⁷ Basrin Melamba, Muhammad Yani, La Janu, Sri Damayanti, Ahmad Marhadi, Muh. Amin Lansawi. *Sejarah Konawe Kepulauan*. (Yogyakarta : CV Istana Agency, 2017), hal. 265.

⁸ *Ibid*, hal 266.

⁹ *Badan Pusat Statistik Konawe Kepulauan, Hasil Sensus Geografi dan Iklim*. (Unaaha: BPS Konkep 2022), hal. 3.

konteks itulah penulisan ini diberi judul **“Kabupaten Pemekaran Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Tahun 2013-2022”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Persoalan pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang kabupaten pemekaran yaitu Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara. Batasan spasial dalam penelitian ini adalah Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang memperlihatkan perkembangan pada berbagai bidang yaitu pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, dan bangunan fisik.

Batasan temporal penulisan ini yaitu tahun 2013 sampai tahun 2022, tahun 2013 diambil sebagai batasan awal adalah karena pada tahun 2013 adalah awal pemekaran. Tahun 2022 adalah batasan akhir yang akan membahas tentang perkembangan Kabupaten Konawe Kepulauan setelah pemekaran dari segi infrastruktur, ekonomi, pembangunan dan pemerintahan, karena pada tahun 2022 kemajuan pembangunan di Konawe Kepulauan untuk mempercepat administrasi dan kesejahteraan rakyat sudah mulai terlihat, dapat dilihat dari data pembangunan jembatan, SK pembangunan jalan lingkar, dokumen Perda Konawe Kepulauan tentang rencana pembangunan jangka menengah, dan dokumen Perda Kabupaten Konawe Kepulauan tentang bangunan gedung. Secara lebih rinci persoalan pokok dalam penelitian ini diarahkan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Bagaimanakah latarbelakang terbentuknya Kabupaten Konawe Kepulauan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB)?

2. Apa sajakah upaya yang dilakukan oleh elit politik setempat dalam proses pemekaran wilayah yang melahirkan kabupaten baru?
3. Bagaimanakah perkembangan pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun 2013 sampai tahun 2022 dibawah kepemimpinan Bupati Ir. Amrullah, MT?
4. Bagaimana pulakah kehidupan ekonomi daerah sejak pemekaran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keberadaan Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara selama tahun 2013 sampai 2022. Dalam rentangan waktu tersebut dijelaskan tentang latarbelakang terbentuknya Kabupaten Konawe Kepulauan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), dan upaya yang dilakukan oleh elit politik setempat dalam proses pemekaran wilayah yang melahirkan kabupaten. Kemudian menjelaskan perkembangan dalam pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun 2013 sampai tahun 2022 dibawah kepemimpinan Bupati Ir. Amrullah, MT. tujuan terakhir adalah menjelaskan keadaan ekonomi daerah sejak pemekaran.

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah menghasilkan sebuah karya tulis yang bermanfaat bagi akademisi yang ingin mengetahui tentang perkembangan Kabupaten Pemekaran Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu juga memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan guna mendapatkan pengetahuan, wawasan sejarah masa sebelum pemekaran dan setelah pemekaran dengan melihat perkembangan wilayah tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang keberadaan Kabupaten Konawe Kepulauan relatif telah banyak dilakukan orang, diantaranya adalah buku yang ditulis oleh Basrin Melamba dkk, yang berjudul *Sejarah Konawe Kepulauan*. Buku ini membahas tentang kawasan geografi Konawe Kepulauan, zaman pra aksara di Konawe Kepulauan, kemudian dari kerajaan hingga distrik Wawonii dan sejarah pemerintahan di Pulau Wawonii, perkembangan penduduk dan migrasi dan terbentuknya masyarakat majemuk di Pulau Wawonii, Pulau Wawonii dalam hegemoni Konawe, Ternate, Buton, dan Kendari (Laiwoei), proses islamisasi di Wawonii, perkembangan pemerintahan Hindia Belanda dari distrik Wawonii ke Kecamatan Wawonii, ekspansi Jepang di Pulau Wawonii, gangguan DI/TII Kahar Muzakar, selanjutnya membahas tentang sejarah bahasa-bahasa di Pulau Wawonii, sejarah pendidikan masyarakat Wawonii, sejarah kecamatan dan pemekaran Kabupaten Konawe Kepulauan, sejarah pemekaran Kabupaten Konawe Kepulauan, sejarah pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan, dan yang terakhir membahas tentang sejarah pembentukan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan.¹⁰

Kemudian artikel yang ditulis oleh Muhammad Isra dalam *Jurnal Arsitektur*, yang berjudul “Perencanaan Kantor Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan”. Membahas tentang perencanaan pembangunan kantor bupati di Kota Langara. Rencana pembangunan gedung kantor bupati Konawe Kepulauan, yang ditinjau dari segi struktural dan segi bentuk serta fungsi, diharapkan dapat

¹⁰ Basrin Melamba, Muhammad Yani, La Janu, Sri Damayanti, Ahmad Marhadi, Muh. Amin Lansiw. *Sejarah Konawe Kepulauan*. (Yogyakarta : CV Istana Agency, 2017).

menampung dan mewadahi segala aktifitas kantor. Sehingga mutu pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan. Disamping itu juga para pegawai yang bekerja di kantor tersebut bisa merasa aman dan nyaman selama bekerja, sehingga mutu pelayanan terhadap masyarakat menjadi jauh lebih memuaskan, baik saat ini maupun yang akan datang. Perencanaan Kantor Bupati Konawe Kepulauan dengan bentuk gedung Kantor Bupati direncanakan mencerminkan khas dari daerah Wawonii yakni bentuk kelapa yang merupakan adat kebesaran suku Wawonii, rumah perahu tradisional suku Bajo, nenas ornamen rumah tradisional Buton dan bentuk lengkungan pada atap merupakan rumah tradisional suku Tolaki¹¹

Selanjutnya artikel dalam *Jurnal Publicuho*, ditulis oleh Sulasman Moita yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Konawe Kepulauan” menjelaskan intensitas pembangunan di Konawe Kepulauan yang semakin meningkat seiring dengan status sebagai daerah otonomi baru sejak tahun 2013, menjadi salah satu alasan pentingnya pengadaan tanah sehingga menjadi perhatian bagi pemerintah setempat. Fokus persoalan bukan pada keterbatasan lahan, karena wilayah ini secara geografis memiliki lahan yang cukup luas, namun lokasi kadang kala tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak pemilik tanah. Atas dasar itu, maka proses pengadaannya harus mengikuti

¹¹ Muhammad Isra. “Perencanaan Kantor Bupati Konawe Kepulauan”. Dalam *Journal Mahasiswa Jurusan Arsitektur*. Vol. 1. No 2. Tahun 2016.

prosedur berdasarkan regulasi dan peraturan yang ada. Analisis pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Konawe Kepulauan mengacu kepada tahapan-tahapan yaitu pengajuan permohonan dan penetapan lokasi, pembentukan panitia pengadaan tanah, penyuluhan atau sosialisasi, pengukuran dan batas-batas tanah, pendataan tanah, pengumuman hasil pendataan tanah, musyawarah warga dan penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian, pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak.¹²

Kemudian terdapat pula sebuah artikel dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, ditulis oleh Laode Samsul Barani yang berjudul “Analisis Potensi Dan Komoditas Unggulan di Kabupaten Konawe Kepulauan”, menjelaskan bahwa hasil sektor unggulan Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sektor pertanian. Sektor pertanian sangat berperan penting dan berpengaruh terhadap sektor lain atau perekonomian daerah secara umum. Dilihat dari perkembangannya terhadap PDRB (produk domestik regional bruto) Kabupaten Konawe Kepulauan, sektor-sektor Pertanian terus meningkat. Sub sektor pertanian yang mendukung perekonomian sektor unggulan di Kabupaten Konawe Kepulauan: sub sektor tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, perkebunan, peternakan dan perikanan.¹³

Selanjutnya artikel dalam *Jurnal Agroindustri* yang ditulis oleh Dhian Herdhiansyah, Ardiansyah, La Rianda, dan Asriani yang berjudul, “Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Industri Kopra: Studi Kasus Kabupaten Konawe

¹² Salsalman Moita. “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Konawe Kepulauan”. Dalam *Jurnal Publicuho*. Vol. 3. No 2 tahun 2020.

¹³ Laode Samsul Barani, Muhammad Armawaddin. “Analisis Potensi Dan Komoditas Unggulan Di Kabupaten Konawe Kepulauan”. Dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 10. No 1. Tahun 2020.

Kepulauan-Sulawesi Tenggara”, menjelaskan bahwa Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki 4.809 hektar lahan kelapa dan menjadi salah satu daerah penghasil kopra utama di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Kepulauan menghasilkan 2.195 ton kelapa pada tahun 2020 (BPS Sultra 2021). Petani kelapa di Kabupaten Konawe Kepulauan hanya mengolah kelapa dalam bentuk kopra dengan cara manual atau tradisional yang telah diturunkan secara turun temurun, maka kondisi tersebut tidak dapat dihindari dan digunakan sebagai ukuran keberhasilan dan kesejahteraan mereka.

Kegiatan pemetikan buah dilakukan dengan cara memanjat pohon dengan menggunakan parang sebagai alat pemetik, kegiatan pengangkutan buah kelapa dilakukan dengan menggunakan keranjang sebagai alat pengumpul, kegiatan pemetikan kelapa dilakukan secara manual menggunakan “*pombungi*” sebagai alat pengupas buah, dan biji kelapa. Kegiatan pembelahan dilakukan secara manual dengan menggunakan *pombungi* sebagai pengupas buah untuk mengeluarkan daging dari tempurung kelapa. Kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang sangat penting setelah kakao dan ini merupakan komoditas terpenting di subsektor perkebunan Sulawesi Tenggara.¹⁴

Penelitian *Skripsi* oleh Sarmanto yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Nelayan (Studi Kasus Masyarakat Langara Bajo Kabupaten Konawe Kepulauan Sultra)” menjelaskan tentang strategi pemberdayaan

¹⁴ Dhian Herdhiansyah, Ardiansyah, La Rianda, Asriani. “Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Industri Kopra: Studi Kasus Kabupaten Konawe Kepulauan-Sulawesi Tenggara”. Dalam *Jurnal Agroindustri*. Vol.7. No 2 Tahun 2021

masyarakat nelayan melalui PNPB Mandiri-KP atau (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan) di Langara Bajo. Strategi pemberdayaan meliputi : penciptaan iklim yang kondusif, penguatan keterampilan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan alat-alat.¹⁵ Dari tinjauan pustaka terlihat bahwa persoalan tentang munculnya Konawe Kepulauan sebagai kabupaten baru di Sulawesi Tenggara belum banyak dibahas orang.

E. Kerangka Analisis

Tema tulisan ini terkait dengan pemerintahan yang berada di tangan pemerintah. Menurut Robert Mac Iver pemerintah adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah.¹⁶ Pemerintahan merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara. Pemerintahan diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai unsur pendukung dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.¹⁷

¹⁵ Sarmanto. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Nelayan (Studi Kasus Masyarakat Langara Bajo Kabupaten Konawe Kepulauan Sultra)". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

¹⁶ Inu Kencana Syafii. *Ilmu Pemerintahan* (Bandung: Mandar maju, 2003), hal. 135.

¹⁷ Sri, Maulidiah, *Pelayanan Publik; Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, (Bandung : Indra Prahasta 2014).

Penulisan ini juga menggunakan konsep pemekaran wilayah. Pemekaran daerah adalah pemecahan suatu daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. Gagasan pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonom baru memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Secara yuridis landasan yang memuat persoalan pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang pembentukan daerah dalam suatu NKRI, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.¹⁸

Konsep pemekaran wilayah (provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luas. Pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari suatu daerah menjadi lebih dari satu daerah. Sedangkan secara substansi pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat

¹⁸ Ahmad Muzawwir, "Analisis Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Batu Bara dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000". *Tesis*, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008, hal. 53.

dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian pembangunan antar pusat daerah.¹⁹

Pemekaran wilayah bertujuan untuk jalannya pembangunan. Pembangunan merupakan “usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir sehingga pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus dan pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah kepada modernitas, modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional, proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.²⁰ Maka dibahas penggunaan dari konsep pemerintahan, pemekaran wilayah dan pembangunan akan dianalisis keberadaan Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun 2013-2022.

F. Metode Penelitian Dan Bahan Sumber

Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah yang merupakan proses untuk mengkaji suatu kebenaran dan menganalisa secara kritis dari data atau sumber sejarah. Adapun tahap yang digunakan dalam metode penelitian ini terdiri

¹⁹ Andik Wahyun Muqoyyidin “ Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan”. Dalam *Jurnal Konstitusi*. Vol 10. No 2 Tahun 2013.

²⁰ Sondang P. Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Administrasi*, (Jakarta. CV. Haji Mas Agung, 1944).

dari empat tahap, yaitu tahap heuristik, tahap kritik sumber, tahap interpretasi, dan tahap historiografi.

Tahap pertama heuristik merupakan kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah, atau evidensi sejarah. Pada tahapan ini, kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber tentang tema yang diteliti, baik yang terdapat di lokasi penelitian, temuan benda maupun sumber lisan.²¹ Adapun sumber-sumber primer yang diperoleh dari penelitian ini didapatkan dari Kantor Bupati Konawe Kepulauan yaitu sumber yang diperoleh berupa arsip tentang pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan, SK Bupati Konawe Kepulauan, dokumen data pembangunan jembatan dan SK pembangunan jalan lingkar Kabupaten Konawe Kepulauan, dokumen Peraturan Daerah Konawe Kepulauan tentang rencana pembangunan jangka menengah, dokumen peraturan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang bangunan gedung. Dokumen peraturan daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Kemudian sumber di dapatkan juga melalui BPS Konawe Kepulauan. Sumber primer lainnya berupa hasil wawancara Online melalui pesan WhatsApp kemudian lewat telepon seluler dengan tokoh masyarakat Konawe Kepulauan yang berperan dalam pemekaran wilayah seperti tokoh utama dalam menuntut pemekaran, Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Konkep, Ketua/Kepala Bappeda Konkep, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan dan lain-lain. Adapun Sumber sekunder

²¹ Sulasman. *Metodologi penelitian sejarah*. (Bandung: pustaka setia, 2014), hal. 93.

yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, makalah atau hasil penelitian, jurnal dan skripsi.

Tahapan kedua adalah kritik sumber merupakan suatu usaha menganalisa, memisahkan dan mencari suatu sumber untuk memperoleh keabsahan sumber yang dibutuhkan. Dalam hal ini dilakukan penyeleksian apakah data tersebut akurat atau tidak, baik dari segi bentuk maupun isinya sehingga dapat di pertanggungjawabkan.²² Kritik terdiri dari dua bentuk yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern lebih menekankan aspek yang mendalam yaitu isi dari sumber-sumber. kritik ekstern lebih mengarah untuk menguji otentitas dan keaslian sumber baik secara fisik maupun non fisik.²³

Tahap ketiga yaitu interpretasi atau melakukan penafsiran atas fakta-fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama dengan teori disusun menjadi interpretasi. Kemudian menyatukan semua fakta yang telah diperoleh sehingga tersusun sebuah kronologi peristiwa dalam bentuk rekonstruksi sejarah.²⁴ Tahap keempat adalah yang merupakan tahap akhir metode sejarah yaitu historiografi atau penulisan dengan cara merekonstruksi masa lampau berdasarkan data yang diperoleh melalui proses menguji dan menganalisa secara kritik, kemudian menempatkan data-data tersebut dalam kerangka yang saling berhubungan dalam bentuk penulisan sejarah berupa skripsi.

²² Dudung Abdurahman. *Metode penelitian sejarah*. (Jakarta:PT. Logos wacana ilmu 1999),hal. 11

²³ Helius Sjamsudin. *Metode sejarah*. (Yogyakarta :Ombak, 2012), hal. 102.

²⁴ Kuntowijoyo. *Pengantar ilmu sejarah*. (Yogyakarta : Yayasan bentang budaya,2001), hal. 103.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara berurutan menjelaskan tentang masalah-masalah yang terdapat dalam penulisan ini. Adapun uraian masing-masing bab yaitu: Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan bahan sumber, sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan mengenai Kabupaten Konawe Kepulauan sebelum pemekaran. Sub pertama membahas tentang kondisi geografis dan pemerintahan, kehidupan sosial, agama dan kebudayaan. Bab III merupakan pembahasan tentang terbentuknya Kabupaten Konawe Kepulauan. Pertama, membahas faktor penyebab pemekaran. Kedua, membahas proses pemekaran. Ketiga, masa awal pemekaran.

Bab IV membahas tentang Perkembangan Kabupaten Konawe Kepulauan Sejak Pemekaran. Pertama, menjelaskan perkembangan pemerintahan. Kedua, perkembangan dalam pembangunan. Ketiga, membahas pembangunan ekonomi. Bab V merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan.